



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)**

Tahun Sidang : 2024-2025

Masa Persidangan : II

Rapat ke : 13 (tiga belas)

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum

Dengan : Forum Penyuluh Nusantara

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Kamis, 13 Februari 2025

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Acara : Aspirasi FPN tentang Kaji Ulang penempatan PKB/PLKB
PPPK

Ketua Rapat : Tutik Kusuma Wardhani, S.E., M.M., M.Kes./Anggota
Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi
IX DPR RI

Hadir : A. Anggota DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI
B. Stakeholder
- Forum Penyuluh Nusantara; Daud Waruwu, S.Pd
besertar jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dilaksanakan berdasarkan Surat Forum Penyuluh Nusantara Nomor 003/FPN-I/II/2025, tanggal 5 Februari 2025, perihal Aspirasi FPN tentang Kaji Ulang penempatan PKB/PLKB PPPK sesuai arahan dari Pimpinan Komisi IX DPR RI.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Forum Penyuluh Nusantara dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ibu Tutik Kusuma Wardhani, S.E., M.M., M.Kes. (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Bali) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

Komisi IX DPR RI menerima masukan dari Forum Penyuluh Nusantara terkait Aspirasi FPN tentang Kaji Ulang penempatan PKB/PLKB PPPK sebagaimana terlampir.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.30 WIB.

Jakarta, 13 Februari 2025

KETUA RAPAT,



TUTIK KUSUMA WARDHANI, S.E., M.M., M.Kes.
A-567

**AUDIENSI KOMISI IX DPR RI
DENGAN FORUM PENYULUH NUSANTARA
KAMIS, 13 FEBRUARI 2025**

I. CATATAN AUDIENSI

1. Penempatan harus mempertimbangkan daerah asal JF PKB dan JF PLKB sehingga memudahkan dalam melakukan edukasi, peningkatan kesadaran, penciptaan norma penggunaan alat kontrasepsi, dan iklim yang kondusif karena biaya hidup, tempat tinggal, dan transportasi terjangkau, ekonomis dan berkelanjutan. Dengan pertimbangan ini maka tujuan dari program bangga kencana secara nasional dapat terwujud karena **petugas langsung berkerja dan tidak memerlukan waktu dan penyesuaian kerja secara kultural dengan lokasi baru.** BKKBN tidak memprioritaskan PLKB non ASN yang ada namanya pada kepka BKKBN nomor: 126/KEP/G3/2021 tentang penetapan data petugas lapangan keluarga berencana non ASN. Sehingga banyak peserta yang bukan PLKB non PNS lulus administrasi.
2. Biaya hidup yang mahal termasuk transportasi sementara gaji dan tunjangan tidak mencukupi. JF PKB dan JF PLKB yang ditempatkan di pelosok provinsi NTT, kalimantan selatan, jambi, NTB, sumatera selatan, babel, aceh, sulawesi tengah dll untuk menuju lokasi memerlukan biaya transportasi yang mahal karena tidak tersedia transportasi umum. Untuk penyediaan transportasi sendiri belum mampu karena tuntutan biaya hidup dan keperluan sehari-hari seperti biaya tempat tinggal, makan, dan transportasi. Hal ini membuat kesejahteraan tidak dapat diperoleh dan kesempatan untuk merancang masa depan seperti menabung tidak dapat dilakukan karena gaji dan tunjangan sudah habis untuk memenuhi tuntutan sehari-hari
3. Balai KB menjadi tempat tinggal sementara namun tidak layak sebagai hunian dan tempat tinggal. Kondisi balai KB yang disulap sebagai tempat tinggal sementara tidak memenuhi persyaratan rumah dimana JF PKB dan JF PLKB harus bersiap jika ada kunjungan dan kegiatan

untuk segera berkemas. Sementara sarana untuk menyewa kontrakan dan tempat tinggal belum dapat dipenuhi karena besarnya biaya hidup sehari-hari. Modal dana awal sudah habis dan kini harus hidup dengan berhutang karena tuntutan penghidupan mulai dari pembelian air minum karena tidak bisa memasak dan biaya transportasi.

4. Pelindungan terhadap JF PKB dan JF PLKB perempuan. Lingkungan yang tidak aman dan tidak ramah perempuan membuat sebagian besar perempuan mengalami kecemasan karena harus melintasi hutan dan jalan sepi karena Jaminan keamanan dan keselamatan kerja tidak mampu disediakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memperbesar peluang kekerasan terjadi. Mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), harusnya pemerintah berinvestasi dalam sistem dukungan komprehensif agar mencegah kejadian dan menjamin JFPKB dan JFPLKB perempuan selama dalam penugasan.
5. **Meminta dukungan Komisi IX DPR RI terhadap permohonan kami agar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN dan KemenPAN RB melakukan evaluasi atas penempatan PPPK dan mempertimbangkan alasan dan analisis problem yang dialami oleh 77 JF PKB dan JF PLKB dan menindaklanjuti permintaan pemulangan dan/atau penempatan ulang kembali dan memberikan diskresi kebijakan.**
6. Meminta agar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN dan Dinas Urusan Keluarga Berencana Kabupaten /Kota berkoodinasi untuk menentukan desain lokasi prioritas program keluarga berencana dan menghitung kebutuhan akan SDM JFPKB dan JFPLKB di wilayah penempatan.
7. Melakukan mapping ulang penempatan di setiap desa/kelurahan dan kecamatan agar penempatan JFPKB dan JFPLKB sesuai kepentingan program Bangga Kencana.

8. Memberikan hak atas sarana dan prasarana termasuk tempat tinggal, transportasi, dan layanan publik yang aman dan ramah perempuan kepada seluruh JFPKB dan JFPLKB untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjalankan kewajibannya dalam mewujudkan program keluarga berencana.
9. Memberikan perlindungan terhadap JFPKB dan JFPLKB perempuan atas tempat tinggal yang layak dan tempat kerja yang aman dan bebas dari tindakan kekerasan seksual.
10. Memastikan bahwa program stunting juga menjangkau anak/generasi penerus dari seluruh JFPKB dan JFPLKB yang ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia.
11. Terdapat juga pengecualian yang seharusnya ditugaskan di daerah A, tapi justru ditempatkan di daerah B, tapi selanjutnya dikembalikan ke daerah asal usulan penugasannya.

II. TANGGAPAN KOMISI IX DPR RI

Komisi IX DPR RI berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh Forum Penyuluh Nusantara.